BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pada praktik penegakan hukum narkoba di Indonesia, terdapat perbedaan dalam penerapan pasal terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam penafsiran pasal 132 ayat (1) UU Narkoba di antara penegak hukum di Indonesia, baik oleh Kepolisian selaku Penyidik, Penuntut Umum, maupun kalangan Hakim yang akhirnya menimbulkan perbedaan dalam penerapan Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) dan Penyertaan (*Deelneming*) terhadap Tindak pidana Narkoba di Indonesia. Terdapatnya klausul “melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan” dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkoba yang merupakan definisi dari Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) menjadikan penegak hukum menafsirkan bahwasanya Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) *lex specialis* dari Pasal Penyertaan dalam Pengaturan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. Namun, pada PJA No. 11 Tahun 2021 jelas menyebutkan bahwasanya Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) berbeda dengan Penyertaan (*Deelneming*).
2. Pada Putusan Perkara Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby penerapan pasal Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba tentang Pemufakatan Jahat (*Samenspanning*) kurang tepat dikarenakan pasal tersebut dikenakan terhadap delik yang selesai (*voltooid delict*), sehingga tidak diperhatikannya unsur “Untuk Melakukan” yang menjadikan penerapan pasal tersebut keliru. Sehingga dalam pembuktiannya tidak sesuai dengan PJA No. 11 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk dilakukan pemenuhan unsur “tindak pidana narkoba secara faktual belum dilakukan” dalam penerapan pasal tersebut. Pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt telah sesuai dengan norma dikarenakan

kejahatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan menggunakan pasal Penyertaan (*Deelneming*) untuk menjerat kejahatan tersebut. Dengan demikian, penegak hukum dapat melihat peran pelaku dalam melakukan tindak pidana dan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan PJA No. 11 Tahun 2021.

4.2 Saran

1. Perlu adanya peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan dan juga penguatan koordinasi terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik kepolisian terkait penanganan hukum narkoba. Di sisi lain, perbedaan penafsiran hukum terkait permufakatan jahat dan penyertaan dalam tindak pidana narkoba di Indonesia memerlukan perhatian serius dan tindakan nyata. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum harus selalu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rumusan pasal-pasal dalam UU Narkoba yang digunakan dalam menjalankan fungsi penuntutan sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum.
2. Aparat Penegak Hukum perlu bersikap profesional dengan setiap menjalankan tugasnya penuh dengan kehati-hatian dan sesuai dengan pedoman-pedoman pelaksanaan sesuai dengan instansi yang bertugas agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum. Karena apabila terdapat kelalaian dan kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maka akan timbul ketidakadilan hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, Penasehat Hukum haruslah mengajukan langkah-langkah dalam menegakan suatu keadilan melalui Eksepsi atau Banding apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal di pengadilan, hal tersebut dapat menjaga kepastian hukum serta sebagai sarana untuk memeriksa ulang pertimbangan hukum hakim tingkat pertama.